

5 Desember 2015

CATATAN KEBIJAKAN

Perubahan Kebijakan Yang Progresif Berlandaskan Bukti

“Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia: Sebuah Studi”



Di saat Pemerintah Indonesia mulai mencanangkan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah masih dihadapkan masalah rendahnya mutu layanan pendidikan dasar. Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah daerah (kabupaten dan kota) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, nyatanya hingga batas akhir yang ditetapkan tahun 2014 belum juga tercapai. Masalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar.

Melesetnya target pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi target SPM, merupakan masalah yang harus segera diselesaikan sebelum Pemerintah mengulirkan Wajib Belajar 12 tahun. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana bukan ansih karena ketiadaan anggaran semata, namun juga karena belum adanya standar biaya satuan investasi sarana dan prasarana yang bisa dijadikan acuan penganggaran.

Berangkat dari kenyataan diatas, Perkumpulan Article 33 Indonesia telah melakukan studi “Penghitungan Standar Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA dan MA di Indonesia” . Studi tersebut ditujukan untuk (1) menghitung satuan biaya sarana dan prasarana sekolah jenjang SD, SMP dan SMA; (2) memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) untuk membuat peraturan tentang Standar Satuan Biaya Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah jenjang SD, SMP dan SMA serta (3) membantu Pemerintah kabupaten/kota di daerah studi untuk menghitung kebutuhan anggaran bagi penyediaan investasi sarana dan prasarana sekolah jenjang SD, SMP dan SMA.

HASIL STUDI

Secara umum, hasil studi ini meliputi dua hal utama, yaitu:

1. Menghasilkan perhitungan satuan biaya sarana prasarana pendidikan, diklasifikasikan untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut kemudian ditentukan biaya satuan per jenis ruangan per standar pendidikan yang hendak dicapai baik itu SPM, SNP maupun standar internasional.
2. Simulasi perhitungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Satuan biaya yang dihasilkan dari studi ini akan menjadi acuan dalam menghitung anggaran sarana prasarana. Uji coba penggunaan hasil studi ini diimplementasikan dalam simulasi untuk memastikan bahwa hasil studi dapat digunakan.

Perhitungan unit cost untuk sarana dan prasarana pendidikan

Hasil perhitungan satuan biaya sarana prasarana pendidikan, diklasifikasikan untuk masing – masing jenjang pendidikan dimana setiap jenjang akan mempunyai biaya satuan per jenis ruangan per standar pendidikan yang akan dicapai. Dengan demikian untuk satu jenis ruang akan mempunyai Sembilan satuan biaya, dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks jumlah satuan biaya per jenis ruangan

Tingkat Pendidikan/Standar	SPM	SNP	SI
Sekolah Dasar	1	2	3
Sekolah Menengah Pertama	4	5	6
Sekolah Menengah Atas	7	8	9

Satuan biaya yang muncul dalam perhitungan ini mencerminkan satuan biaya untuk membangun satu ruang tertentu beserta perlengkapan yang ada di dalamnya, tidak termasuk pengadaan lahan. Pengadaan lahan akan dihitung tersendiri sebagai faktor penambah, baik jika suatu ruang akan dibangun diatas lahan baru (landed title) ataupun diatas ruang yang sudah ada (strata title).

1. Sekolah Dasar

Jumlah ruang di tingkat sekolah dasar sebanyak 4 ruang untuk SPM, 11 ruang untuk pencapaian SNP, dan 18 ruang untuk pencapaian SI. Jumlah ruang yang muncul dalam perhitungan ini mempertimbangkan apa yang ada diperaturan dan apa yang pada prakteknya ditemukan di lapangan. Jika terdapat penambahan ruang dikemudian hari karena kebutuhan yang bertambah, dapat dihitung kembali. Hasil perhitungan satuan biaya untuk tingkat SD dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Satuan Biaya Sarana Prasarana tingkat SD

No	Ruang	Satuan Biaya		
		SPM	SNP	SI
1	Ruang Kelas	158,711,200	160,351,200	184,348,800
2	Ruang Perpustakaan	0	231,359,500	345,727,100
3	Ruang Pimpinan (termasuk R. Wakil Kepala Sekolah)	33,100,000	55,490,000	83,410,000
4	Ruang Guru	119,557,010	126,527,010	201,367,010
5	Ruang Tata Usaha	0	44,541,890	44,541,890
6	Tempat Ibadah	0	87,692,000	96,542,000
7	Ruang UKS	0	36,135,000	52,560,000
8	Toilet	0	48,420,000	61,360,000
9	Gudang	0	44,880,000	44,880,000
10	Tempat bermain/olahraga	0	1,076,053,000	1,077,607,000
11	Lab. Komputer	0	0	450,829,600
12	Workshop PTD	0	0	212,774,600
13	Ruang Litbang (R&D) Guru/KKG (untuk SD)/MGMP (untuk selain SD)	0	0	179,317,600
14	Ruang media pembelajaran	0	0	163,168,800
15	Ruang Serbaguna/Aula	0	0	155,354,800
16	Green House	0	0	86,220,000
17	Kantin/Kafetaria	0	0	72,420,000
18	Ruang Kesenian	0	0	66,980,000
19	Alat Peraga (IPA, IPS, Matematika, Bahasa, Kesenian, Penjaskes)	34,180,000	45,930,000	0
Total		1,139,104,210	2,759,135,600	4,501,153,200

(Hasil olah data primer)

Beberapa catatan tentang hasil perhitungan di atas adalah: 1) terdapat ruang konseling untuk SNP dan SI yang sudah disatukan dengan ruang UKS; 2) ruang untuk alat peraga dalam SI dimasukkan dalam ruang workshop PTD.

Dari perhitungan satuan biaya di atas, terlihat bahwa untuk membangun satu ruang kelas SD, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara SPM dan SNP, yaitu sekitar 160 juta sementara untuk SI biayanya sekitar 180 juta. Demikian juga untuk ruang Tata Usaha, Gudang, dan tempat bermain/olah raga, tidak jauh berbeda antara SNP dan SI. Perbedaan satuan biaya terlihat pada ruang pimpinan, ruang guru, toilet, dan ruang UKS antara SNP dan SI.

Hasil studi ini juga menghitung jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu sekolah SD baru dengan enam rombongan belajar. Untuk SPM dibutuhkan biaya Rp. 1,14 milyar, SNP dibutuhkan biaya Rp. 2,76 Milyar, dan untuk SI dibutuhkan biaya

Rp. 4,5 Milyar. Untuk membangun sebuah sekolah dengan standar SNP dibutuhkan biaya lebih dari dua kali lipat SPM, dan untuk membangun sekolah SD baru berstandar SI dibutuhkan 1,5 kali lipat SNP. Perbedaan biaya ini terutama disebabkan jumlah ruang yang berbeda yang dipersyaratkan oleh masing-masing standar, selain karena perbedaan satuan biaya untuk ruang yang sama.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Di tingkat SMP, untuk pencapaian SPM terdapat 6 ruangan, sementara untuk pencapaian SNP terdapat 15 ruangan, dan untuk pencapaian SI terdiri dari 26 ruangan. Di tingkat SMP, jumlah ruang lebih banyak dibanding SD. Misalnya untuk SPM, terdapat tambahan ruang Lab IPA, di SNP terdapat tambahan ruang konseling dan ruang OSIS, dan di SI terdapat tambahan ruang laboratorium kimia, fisika, dan biologi masing-masing tersendiri. Hasil perhitungan satuan biaya untuk tingkat SMP dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Satuan Biaya Sarana Prasarana tingkat SMP

No	Ruang	Satuan Biaya		
		SPM	SNP	SI
1	Ruang Kelas	161,466,800	163,106,800	187,104,400
2	Ruang Perpustakaan	0	296,186,500	410,054,100
3	Ruan Lab IPA	252,256,800	292,996,800	0
4	Ruang Pimpinan (termasuk R. Wakil Kepala Sekolah)	33,100,000	55,490,000	78,910,000
5	Ruang Guru	204,122,680	211,092,680	335,620,680
6	Ruang Tata Usaha	0	49,581,890	109,371,890
7	Tempat Ibadah	0	87,692,000	96,542,000
8	Ruang Konseling	0	28,615,000	50,355,000
9	Ruang UKS	0	36,505,000	57,560,000
10	Ruang OSIS	0	23,171,600	31,441,600
11	Toilet	0	48,420,000	61,360,000
12	Gudang	0	51,210,000	55,610,000
13	Ruang Sirkulasi	0	9,495,000	9,495,000
14	Tempat bermain/olahraga	2,110,000,000	2,141,928,000	2,143,482,000
15	Lab. Komputer	0	0	511,169,600
16	Lab. Kimia	0	0	267,756,800
17	Lab. Fisika	0	0	357,956,800
18	Lab. Biologi	0	0	367,756,800
19	Workshop PTD	0	0	262,942,600
20	Ruang Litbang (R&D) Guru/KKG (untuk SD)/MGMP (untuk selain SD)	0	0	196,197,600
21	Ruang media pembelajaran	0	0	182,804,400
22	Ruang Serbaguna/Aula	0	0	173,382,400
23	Green House	0	0	86,220,000
24	Kantin/Kafetaria	0	0	81,160,000
25	Ruang Satpam	0	0	9,490,000
26	Ruang Koperasi	0	0	13,828,900
27	Ruang Kesenian	0	0	92,360,000
28	Alat Peraga dan Alat Kesenian	35,000,000	55,000,000	0
Total		3,603,280,280	4,336,025,270	7,165,454,570

(Hasil olah data primer)

Beberapa catatan tentang hasil perhitungan di atas adalah: 1) untuk SI laboratorium IPA dipecah dalam laboratorium kimia, fisika dan biologi secara terpisah; 2) ruang untuk alat peraga dalam SI dimasukkan dalam ruang workshop PTD.

Secara umum terlihat bahwa untuk membangun

satu ruang kelas dan ruang guru SMP, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara SPM dan SNP (perbedaan dibawah 10 juta). Sementara untuk ruang yang lain rata-rata terdapat perbedaan sekitar 20 juta sampai 40 juta. Untuk SI, hampir semua ruang mempunyai perbedaan yang cukup besar antara SNP

dan SI, kecuali beberapa ruang standar seperti tempat ibadah, ruang osis, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/olah raga.

Jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu sekolah SMP baru dengan enam rombongan belajar, untuk SPM sebesar Rp. 3,6 milyar, SNP membutuhkan biaya sebesar Rp. 4,36 Milyar, dan untuk SI memerlukan biaya Rp. 7,16 Milyar. Untuk membangun sebuah sekolah SMP dengan standar SNP dibutuhkan biaya 25% lebih mahal dari SPM, dan untuk membangun sekolah SMP baru berstandar SI dibutuhkan hampir dua kali lipat SNP. Perbedaan biaya ini terutama disebabkan jumlah ruang yang berbeda yang dipersyaratkan oleh masing-masing standar, selain karena perbedaan satuan biaya untuk ruang yang sama.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sampai saat ini belum ada aturan yang menatur tentang SPM di tingkat SMA, oleh karena itu standar yang ada dalam perhitungan ini hanya SNP dan SI. Terdapat 19 ruang untuk pencapaian SNP, dan terdapat 26 ruang untuk pencapaian SI. Untuk tingkat SMA, jumlah ruang jauh lebih banyak dari SMP. Hal ini dikarenakan jumlah laboratorium yang lebih banyak, selain laboratorium fisika, kimia, dan biologi, juga terdapat laboratorium bahasa dan komputer. Selain itu, juga dipersyaratkan adanya kantin atau kafetaria untuk menunjang penyediaan makanan sehat bagi peserta didik. Hasil perhitungan satuan biaya untuk tingkat SMA dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. Hasil Perhitungan Satuan Biaya Sarana Prasarana tingkat SMA

No	Ruang	Satuan Biaya		
		SPM	SNP	SI
1	Ruang Kelas	0	163,106,800	187,104,400
2	Ruang Perpustakaan	0	488,626,500	602,494,100
3	Ruang Pimpinan (termasuk R. Wakil Kepala Sekolah)	0	55,490,000	78,910,000
4	Ruang Guru	0	246,270,240	406,908,240
5	Ruang Tata Usaha	0	49,581,890	109,371,890
6	Tempat Ibadah	0	87,692,000	96,542,000
7	Ruang Konseling	0	28,615,000	56,655,000
8	Ruang UKS	0	36,505,000	57,560,000
9	Ruang OSIS	0	23,541,600	31,441,600
10	Toilet	0	49,420,000	73,840,000
11	Gudang	0	51,210,000	51,210,000
12	Tempat bermain/olahraga	0	2,142,228,000	2,143,482,000
13	Lab. Komputer	0	315,232,000	512,969,600
14	Lab. Bahasa	0	367,562,000	390,489,600
15	Lab. Kimia	0	405,596,000	420,356,800
16	Lab. Fisika	0	352,996,800	367,756,800
17	Lab. Biologi	0	352,996,800	367,756,800
18	Workshop PTD	0	0	262,942,600
19	Ruang Litbang (R&D) Guru/KKG (untuk SD)/MGMP (untuk selain SD)	0	0	196,197,600
20	Ruang media pembelajaran	0	0	182,804,400
21	Ruang Serbaguna/Aula	0	0	173,382,400
22	Green House	0	0	86,220,000
23	Kantin/Kafetaria	0	81,160,000	81,492,000
24	Ruang Satpam	0	0	9,490,000
25	Ruang Koperasi	0	0	18,048,900
26	Ruang Kesenian	0	0	85,375,000
27	Alat Peraga (IPS, Matematika, dll) dan Alat Kesenian (Kesenian dan Olah Raga)	0	52,900,000	0
Total		-	6,166,265,430	7,986,323,730

(Hasil olah data primer)

Sebagai catatan, dalam hal penyediaan fasilitas laboratorium, tidak terdapat perbedaan antara SNP dan SI, keduanya mempunyai lima jenis laboratorium yaitu laboratorium kimia, fisika, biologi, bahasa dan komputer. Sama seperti tingkat pendidikan yang lain, ruang untuk alat peraga dalam SI dimasukkan dalam ruang workshop PTD. Ruang yang mempunyai perbedaan satuan biaya tidak terlalu jauh berbeda adalah ruang osis, kantin, dan tempat bermain/olah raga. Selain itu, semua ruang mempunyai perbedaan yang signifikan.

Jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu sekolah SMA baru dengan enam rombongan belajar, untuk SNP sebesar Rp. 6,16 milyar, dan untuk SI memerlukan biaya Rp. 7,99 Milyar. Untuk membangun sebuah sekolah SMA dengan standar SI dibutuhkan biaya 30% lebih mahal dari SNP. Perbedaan biaya ini terutama disebabkan jumlah ruang yang berbeda yang dipersyaratkan oleh masing-masing standar, selain karena perbedaan satuan biaya untuk ruang yang sama.

Simulasi Perhitungan Anggaran Sarana Prasarana di Kabupaten Bantul

Hasil perhitungan satuan biaya sarana prasarana digunakan untuk menghitung anggaran kebutuhan sarana prasarana pendidikan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk menguji apakah hasil perhitungan tersebut dapat digunakan, maka dilakukan simulasi perhitungan anggaran sarana prasarana. Simulasi ini dilakukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, dengan pertimbangan data yang relative lebih lengkap dibanding wilayah sampel yang lain. Untuk simulasi ini data sarana prasarana yang dibutuhkan adalah data jenis ruang di sekolah, jumlah unitnya, dan kondisinya.

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan ini pertama-tama adalah membandingkan antara jumlah rombongan belajar (rombel) dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam standar pendidikan yang paling minimal (SPM) dimana jumlah ruang kelas sama dengan jumlah rombel. Jumlah ruang-ruang lain dipengaruhi oleh jumlah rombel ini. Misalnya, jumlah ruang guru untuk enam rombel adalah suatu luasan tertentu. Jika jumlah rombel dua kali lipat, maka jumlah ruang guru secara sederhana akan mempunyai luasan dua kali lipat (dengan asumsi jumlah guru bertambah dua kali lipat).

Pembangunan ruang baru dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, membangun diatas lahan, yang artinya membutuhkan lahan baru untuk membangun ruang baru, atau alternative kedua, terutama untuk sekolah yang mempunyai kesulitan untuk menambah lahan karena keterbatasan ketersediaan lahan, adalah dengan membangun diatas ruang yang sudah ada. Kedua cara tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Jika membangun di atas lahan baru artinya harus ada pembelian tanah. Biaya pembelian tanah ini akan menjadi biaya tambahan selain satuan biaya ruang yang sudah dihitung sebelumnya. Tantangan dalam cara pembangunan ini adalah kesulitan dalam penentuan harga tanah karena keragaman harga tanah dalam suatu wilayah tertentu. Harga tanah dipengaruhi

oleh lokasi sekolah yang berangkutan. Cara kedua, membangun di atas ruang yang sudah ada, lebih mudah diprediksi harganya. Dalam ketentuan disebutkan bahwa biaya satuan ruang yang dibangun di atas ruang yang ada, artinya harus ada pengecoran atas yang nantinya sebagai lantai, adalah sebesar 1,2 kali satuan biaya ruang tersebut.

Perhitungan simulasi anggaran sarana prasarana baik untuk memperbaiki yang ada maupun mengadakan yang belum ada menghasilkan total kebutuhan anggaran sarana prasarana wilayah tersebut untuk semua jenjang pendidikan maupun pilihan standar yang ingin dicapai. Dalam membaca hasil perhitungan ini dan merumuskan jumlah anggaran sarana prasarana yang akan dianggarkan di APBD, beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah: pertama, bahwa jumlah total kebutuhan anggaran sarana prasarana tidak hanya menjadi tanggung jawab kabuoaten/kota, tapi juga pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dipetakan berapa persen dari total kebutuhan anggaran yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, dalam simulasi ini adalah Kabupaten Bantul; kedua, bahwa dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk mencapai suatu standar tertentu, tidak harus dipenuhi pada satu tahun anggaran. Pemenuhan data dilakukan misalnya dalam tiga tahun dengan pilihan alokasi tertentu, misalnya 40%, 40%, 20%. Pengambilan keputusan tentang pengalokasian ini sepenuhnya adalah keputusan politik, selain mempertimbangkan kapasitas fiskal yang ada.

1. Sekolah Dasar

Data yang berhasil dikumpulkan untuk kondisi sarana prasarana sebagai prasyarat dalam simulasi perhitungan anggaran sarana prasarana hanya mereka yang rusak berat. Sementara yang rusak sedang tidak diketahui. Hasil perhitungan di bawah ini menggambarkan anggaran yang dibutuhkan untuk mengganti sarana prasarana yang rusak berat di tingkat SD di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Tabel 5. Anggaran Sarana Prasarana untuk penggantian yang rusak di SD di Kabupaten Bantul, Yogyakarta

No	Kecamatan	SPM	SNP	SI
1	Kec. Bambang Lipuro	155,971,845	157,583,538	181,166,940
2	Kec. Banguntapan	857,845,146	866,709,461	996,418,168
3	Kec. Bantul	1,949,648,059	1,969,794,229	2,264,586,746
4	Kec. Diingo	233,957,767	236,375,307	271,750,410
5	Kec. Imogiri	623,887,379	630,334,153	724,667,759
6	Kec. Jetis	155,971,845	157,583,538	181,166,940
7	Kec. Kasihan	233,957,767	236,375,307	271,750,410
8	Kec. Kretek	389,929,612	393,958,846	452,917,349
9	Kec. Pajangan	155,971,845	157,583,538	181,166,940
10	Kec. Pandak	311,943,689	315,167,077	362,333,879
11	Kec. Piyungan	1,403,746,602	1,418,251,845	1,630,502,457
12	Kec. Pleret	77,985,922	78,791,769	90,583,470
13	Kec. Pundong	467,915,534	472,750,615	543,500,819
14	Kec. Sanden	389,929,612	393,958,846	452,917,349
15	Kec. Sedayu	233,957,767	236,375,307	271,750,410
16	Kec. Sewon	545,901,456	551,542,384	634,084,289
17	Kec. Srandakan	155,971,845	157,583,538	181,166,940
Total		8,344,493,691	8,430,719,298	9,692,431,275

(Hasil olah data primer)

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa anggaran penggantian sarana prasarana untuk mencapai standar SPM dan SNP tidak terlalu jauh berbeda, untuk SPM sebesar Rp. 8,3 Milyar, dan untuk SNP sebesar Rp. 8,4 milyar. Sementara untuk mencapai SI sebesar Rp. 9,7 milyar.

Di tingkat SD, selisih antara rombongan belajar dan ruang kelas yang tersedia adalah 43 ruang kelas, sehingga harus disediakan ruang kelas sebanyak itu. Dengan skenario 21 ruang kelas dibangun di lahan baru dan 22 ruang kelas dibangun bertingkat, maka biaya yang harus dialokasikan untuk pengadaan ruang kelas baru adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Biaya Penambahan Ruang Kelas Baru

Standar	Biaya Penambahan Ruang
SPM	7,867,789,322
SNP	7,937,092,146
SI	8,951,178,408

Secara total, baik penggantian sarana prasarana yang rusak (hanya yang rusak berat) maupun penambahan ruang kelas baru (diasumsikan tidak membutuhkan penambahan ruang lain karena penambahannya tidak terlalu banyak), maka total kebutuhan anggaran sarana prasarana untuk tingkat SD adalah sebesar:

Tabel 7. Total Anggaran sarana prasarana SD

Standar	Biaya Perbaikan	Biaya Penambahan Ruang	Total
SPM	8,344,943,691	7,867,789,322	16,212,283,012
SNP	8,430,719,298	7,937,092,146	16,367,811,445
SI	9,692,431,275	8,951,178,408	18,643,609,682

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Untuk SMP terdapat data rusak sedang dan rusak berat, namun tidak semua lengkap. Perhitungan dilakukan berdasarkan data yang ada, sehingga jika kemudian ditemukan data yang lebih lengkap simulasi perhitungan dapat dilakukan kembali.

Tabel 8. Anggaran Sarana Prasarana untuk penggantian yang rusak di SMP di Kabupaten Bantul, Yogyakarta

No	Kecamatan	SPM	SNP	SI
1	Kec. Bambang Lipuro	-	9,714,564	17,095,120
2	Kec. Banguntapan	-	324,070,979	380,022,101
3	Kec. Bantul	16,264,347	51,629,175	92,516,072
4	Kec. Diinggo	958,105,585	1,409,336,628	1,887,972,488
5	Kec. Imogiri	109,633,374	254,389,073	313,688,823
6	Kec. Jetis	-	0	0
7	Kec. Kasihan	1,042,055,147	1,381,641,535	1,738,131,231
8	Kec. Kretek	-	0	0
9	Kec. Pajangan	354,583,933	421,237,531	573,434,868
10	Kec. Pandak	-	0	0
11	Kec. Piyungan	-	0	0
12	Kec. Pleret	-	0	0
13	Kec. Pundong	1,552,233,651	1,912,148,082	2,285,243,892
14	Kec. Sanden	612,855,265	957,940,047	1,165,753,317
15	Kec. Sedayu	-	0	0
16	Kec. Sewon	1,140,770,626	1,640,342,498	2,014,623,921
17	Kec. Srandakan	307,317,841	312,101,641	389,753,003
Total		6,093,819,770	8,674,551,752	10,858,234,837

Di tingkat SMP, selisih antara rombongan belajar dan ruang kelas yang tersedia adalah 319 ruang kelas, sehingga harus disediakan ruang kelas sebanyak itu. Dengan skenario 160 ruang kelas dibangun di lahan baru dan 159 ruang

kelas dibangun bertingkat, maka biaya yang harus dialokasikan untuk pengadaan ruang kelas baru adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Biaya Penambahan Ruang Kelas Baru, SMP

Standar	Biaya Penambahan Ruang
SPM	10,477,766,347
SNP	10,566,676,907
SI	11,852,044,258

Secara total, baik penggantian sarana prasarana yang rusak (rusak sedang dan rusak berat) maupun penambahan ruang kelas baru, maka total kebutuhan

anggaran sarana prasarana untuk tingkat SMP untuk masing-masing standar adalah sebesar:

Tabel 10. Total Anggaran sarana prasarana SMP

Standar	Biaya Perbaikan	Biaya Penambahan Ruang	Total
SPM	6,093,819,770	10,477,766,347	16,571,586,117
SNP	8,674,551,751	10,565,676,907	19,240,228,659
SI	10,858,234,837	11,852,044,258	22,710,279,094

Sumber: Hasil Studi A33, 2015

3. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Untuk SMA terdapat hanya terdapat data rusak berat, namun tidak semua lengkap. Perhitungan dilakukan

berdasarkan data yang ada, sehingga jika kemudian ditemukan data yang lebih lengkap simulasi perhitungan dapat dilakukan kembali.

Tabel 11. Anggaran Sarana Prasarana untuk penggantian yang rusak di SMA di Kabupaten Bantul, Yogyakarta

No	Kecamatan	SNP	SI
1	Bantul	0	0
2	Sewon	0	0
3	Kasihan	0	0
4	Sedayu	0	0
5	Pajangan	0	0
6	Srandakan	0	0
7	Sanden	0	0
8	Kretek	0	0
9	Bambanglipuro	0	0
10	Pundong	0	0
11	Imogiri	0	0
12	Jetis	199,298,100	206,550,721
13	Pleret	173,452,038	180,704,659
14	Piyungan	0	0
15	Banguntanpan	0	0
16	Dlingo	0	0
Total		372,750,137	387,255,380

(Hasil olah data primer)

Belum terdapat data tentang ruang baru yang dibutuhkan, sehingga belum ada perhitungan untuk penambahan ruang baru.

Kabupaten Bantul sebesar 82,6 milyar untuk SPM (pendidikan dasar), 86,2 milyar untuk SNP, dan 98,2 milyar untuk mencapai SI, seperti terlihat pada tabel berikut:

Secara total untuk semua jenjang pendidikan, anggaran sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh

Tabel 12. Total kebutuhan anggaran sarana prasarana Kabupaten Bantul, Yogyakarta

		SPM	SNP	SI
SD	Biaya Perbaikan	8,344,493,691	8,430,719,298	9,692,431,275
	Biaya Penambahan Ruang	7,867,789,322	7,937,092,146	8,951,178,408
	Total	16,212,283,012	16,367,811,445	18,643,609,682
SMP	Biaya Perbaikan	6,093,819,770	8,674,551,752	10,858,234,837
	Biaya Penambahan Ruang	10,477,766,347	10,565,676,907	11,852,044,258
	Total	16,571,586,117	19,240,228,659	22,710,279,094
SMA	Biaya Perbaikan		372,750,137	387,255,380
	Biaya Penambahan Ruang			
	Total		372,750,137	387,255,380
Grand Total		32,783,869,129	35,980,790,241	41,741,144,156



Photo credit: ©Josh Estey/USAID Program Representasi

REKOMENDASI

1. Seperti diketahui bahwa, sampai saat ini belum ada suatu dasar yang jelas tentang bagaimana seharusnya perencanaan anggaran sarana prasarana pendidikan dilakukan. Dinas pendidikan biasanya merujuk pada perhitungan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti Dinas PU atau pihak ketiga lainnya dalam perhitungan ini. Hasil studi ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran sarana prasarana di sekolah dengan disesuaikan pada kebutuhan masing-masing daerah.
2. Pemerintah pusat dapat membuat pedoman perhitungan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana sehingga memudahkan pemerintah daerah. Dengan mengacu pada buku panduan bagi daerah untuk menyusun perencanaan anggaran sarana prasarana pendidikan. Dorongan dari pemerintah pusat dengan menerbitkan panduan yang berisi tentang langkah-langkah konseptual dan teknis yang mengacu pada hasil studi ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan proses perencanaan.
3. Perlu adanya perbaikan pendataan sarana prasarana pendidikan baik di pusat dan daerah yang nantinya dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembiayaan. Kualitas pendataan sarana prasarana di banyak daerah di Indonesia masih lemah. Hal ini sangat mungkin terkait dengan tidak adanya mekanisme insentif dalam proses input data dari sekolah ke dalam system. Tidak seperti data siswa yang dikaitkan dengan program BOS, dimana data siswa selalu tersedia tepat waktu, data sarana prasarana relative tertinggal. Perlu dipikirkan mekanisme yang lebih efektif agar data ini tersedia dan up to date. Salah satunya mungkin dengan mengaitkan data sarana prasarana dengan perolehan DAK dengan kejelasan kriteria penerimaan bantuan.
4. Perlu pemetaan skema penganggaran sarana-prasarana pendidikan. Skema pembiayaan sarana prasarana dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Bentuk pembiayaan dapat berasal dari DAK, DAU, rehab sekolah, Dana Insentif Daerah (DID), dekonsentrasi, dan mekanisme lainnya. Pemetaan skema pembiayaan ini sangat penting terutama untuk mendefinisikan mana yang menjadi kewenangan masing-masing pihak.
5. Perlu road map pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan untuk menunjang pelayanan pendidikan dan pelaksanaan wajar 12 tahun. Secara nasional, perlu dipikirkan untuk membuat peta jalan dimana semua provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dapat mengetahui bagaimana pemerintah pusat akan memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Bagaimana strategi yang ditempuh pemerintah dengan keterbatasan anggaran yang ada, dan apa kriteria suatu sekolah mendapatkan anggaran di suatu waktu tertentu. Hal ini harus jelas agar transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penggunaan anggaran terjamin.

Publikasi ini dibuat atas dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Rekomendasi dan temuan dalam publikasi ini merupakan tanggung jawab Perkumpulan Article 33 Indonesia, dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Ide besar kemunculan lembaga ini adalah keinginan kuat beberapa pegiat muda untuk membentuk sebuah think thank institution. Layaknya lembaga Think Thank, para pegiat lembaga ini mempunyai visi yang sama untuk berperan secara aktif membentuk lembaga advokasi berbasis riset. Tepat pada bulan Juli 2012 melalui akta notaris nomor ., lembaga ini resmi menjadi Article 33 Indonesia. Perubahan nama ini telah disahkan melalui akta notaris dan dicatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 Oktober 2012, dengan nama resmi "Perkumpulan Artikel 33 Indonesia"

Nama Article 33 Indonesia tercetus dari keinginan menegakkan cita-cita luhur dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."